

**PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2016**

**Oleh: Lydia Iswandi
Dosen Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/fax. 0761-63277

ABSTRACT

The reform era was marked by the demands of good governance that required transparency, effectiveness and efficiency, accountability and public participation in every process of public policy. Technological advances are very fast motivating the government to create a new revolution in the form of the shifting of manual work systems into digital by implementing E-Government as a form of governance reform to realize more affordable service practices and expand public access to information. Based on Presidential Instruction No. 03 of 2003 concerning National Policy and Strategy for E-Government development.

Based on the background of the problem that the author mentioned above, then the related matter is the main problem in this study, namely: How is the development of E-Government in the implementation of Regional Governance in Riau Province in 2016 and what are the inhibiting factors for E-Government development in implementation of regional governance in Riau Province in 2016. In carrying out this research, the author uses a qualitative approach and descriptive type of research, which conducts research directly at the location or place studied aims to obtain a clear and complete description of a situation or problem under study

The results of the study found that the development of E-Government in the Regional Government of Riau was already at the maturation stage with the implementation of each level of E-Government development strategy in accordance with Presidential Instruction No. 03 of 2003. While the obstacles encountered in E-Government development were internalized: maximum network security, less availability of general data, development data and spatial data, and budget constraints. External barriers: low public knowledge of information technology, lack of commitment of each Riau Province SKPD and District / City SKPD on data integrity, data exchange and data entry and high public information disputes.

Keywords: Development, E-Government, Governance

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah mempercepat proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi di bidang administrasi pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi informasi. Kemajuan teknologi yang sangat cepat memotivasi pemerintah untuk menciptakan revolusi baru berupa peralihan sistem kerja yang manual menjadi digital dengan menerapkan *E-Government* sebagai bentuk reformasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi.

Inisiatif ke arah *electronic government* di Indonesia telah diperkenalkan sejak tahun 2001, Tanggal 24 April 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *Good Governance* dan mempercepat proses demokrasi. Namun inisiatif pemerintah pusat ini tidak mendapat dukungan serta respon dari para kepentingan pemerintah di tandai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal. Kemudian keluarnya Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang mewajibkan Kementrian/Lembaga Negara,

Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia untuk menerapkan *E-Government* menjadi dasar pemerintah tingkat Provinsi dalam melaksanakan *E-Government*. Pada tingkat daerah Pemerintahan Daerah Provinsi Riau memiliki Perda No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Keterbukaan. Pemerintah daerah melaksanakan kewenangan yang berbasis teknologi informasi dan keterbukaan

Pada Tahun 2016 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tergabung dalam *server riau.go.id* yang berada dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yang merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Diskominfo terletak dikomplek kantor Gubernur Provinsi Riau, Jln Jendral Sudirman No 460 Kota Pekanbaru. Kedudukan Diskominfo Provinsi Riau dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Penerapan *E-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau mulai di lakukan sejak Tahun 2009 dan mulai efektif sejak tahun 2011 melalui *website* yang dikelola Diskominfo menjaring informasi dari seluruh kabupaten/kota untuk disiarkan dalam *website* yang dinamai; ***mediacenter.riau.go.id***, ***riau.go.id***, ***diskominfo.riau.go.id***. Diskominfo Provinsi Riau memiliki peran untuk mengelola penyelenggaraan data elektronik, melakukan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kegiatan dibidang infrastruktur teknologi, pengembangan pengelolaan aplikasi

serta keamanan informasi dan komunikasi

Namun permasalahan yang muncul dalam pengembangan *E-Government* di Pemerintahan Provinsi Riau tersebut adalah ketersediaan sumber daya manusia yang masih terbatas, Kurang optimalnya layanan informasi publik (personal, sarana dan konten) yang ada didalam *website* karena ketersediaan data umum didalam *website* belum maksimal dan anggaran yang belum memadai dalam menunjang pengembangan *E-Government*

Hal ini merupakan hal yang menarik untuk diketahui dan diteliti, karena pada dasarnya saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam rangka meningkat-kan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara efektif dan efisien

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti sudah sampai tingkat manakah pengembangan *E-Government* dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Riau tahun 2016 dan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti diajukan dalam pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimana pengembangan *E-Government* dalam penyelenggaraan tata kelola

C. Tujuan Penelitian

bagaimana dinamika yang terjadi dalam proses pengembangan *E-Government* tersebut sebagai faktor penghambat dalam pengembangan *E-Government* dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Riau tahun 2016 tersebut secara sistematis melalui tahapan realistis dan terukur berdasarkan Instruksi Presiden No 3 tahun 2003. Sebagai mana kita ketahui *E-Government* di Provinsi Riau diamanahkan kepada Diskominfo Provinsi Riau sebagai *leading sector* melalui *Roadmap* yang telah disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Provinsi Riau mulai serius menerapkan *E-Government* dengan diselenggarakannya Riau Go IT yang merupakan tema Provinsi Riau pada hari jadi Provinsi Riau yang ke-59 pada 9 agustus 2016. Diskominfo merancang sistem yang mengintegrasikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni aplikasi *E-Government*, oleh karena itu penulis mencoba meneliti dan mengkaji mengenai penelitian yang berjudul :”**Pengembangan E-Government Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2016**”.

Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2016 ?

2. Apa saja faktor penghambat pengembangan *E-Government* dalam penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2016?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pengembangan *E-Government* dalam penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2016
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengembangan *E-Government* dalam penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2016

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara akademis, sebagai bahan kajian ilmiah dan dapat

E. Tinjauan Pustaka

1. *Elektronic Government*

Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* menjelaskan bahwa *E-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *E-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Menurut Indrajit (2002 : 36) *E-Government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasiskan

memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya tentang pengembangan *E-Government* dalam penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau tahun 2016

2. Manfaat secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintahan Daerah Provinsi Riau agar dapat meningkatkan pengembangan *E-Government* dalam tata kelola pemerintahan.

elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada intinya *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain)

2. Tahapan Pengembangan *E-Government*

Pengembangan *E-Government* menurut Inpres No 3 Tahun 2003 (2003 : 17-18) merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Berdasarkan INPRES No. 3 Tahun 2003, Terlaksananya pemanfaatan TI secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu:

- a.) Tingkat 1 – Persiapan

- Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;
 - Penyiapan SDM
 - Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana *multipurpose community center*, warnet, SME-Center, dll;
 - Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik
- b.) Tingkat 2 – Pematangan
- Pembuatan situs informasi publik interaktif;
 - Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;
- c.) Tingkat 3 – Pemantapan yang meliputi :
- Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
 - Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
- d.) Tingkat 4 – Pemanfaatan, yaitu pembuatan aplikasi untuk layanan yang bersifat *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)*, *Government to Consumers/community (G2C)* yang terintegrasi.

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian pendekatan kualitatif. Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang teliti.

3. Tata kelola Pemerintah (Governance)

Kemitraan mendefinisikan tata kelola pemerintahan sebagai proses memformulasikan dan melaksanakan kebijakan, peraturan, pelayanan, serta prioritas-prioritas pembangunan melalui interaksi antara eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan partisipasi dari empat arena tata kelola pemerintahan yaitu 1) pemerintah, 2) birokrasi, 3) masyarakat sipil, 4) masyarakat ekonomi. Keempat arena ini memiliki fungsi masing-masing; kinerja di setiap fungsinya, secara keseluruhan menentukan kualitas tata pemerintahan di provinsi.

Menurut Dwiyanto (2002) bahwa kinerja tata pemerintahan dapat dinilai dari seberapa jauh prinsip-prinsip demokrasi, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjiwai praktik penggunaan kekuasaan negara dalam proses pengambilan kebijakan dan implementasinya. Kalau proses kebijakan publik dan implementasinya didasarkan pada nilai-nilai tersebut, maka kinerja tata pemerintahannya dapat dinilai baik

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, khususnya di kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Riau yang terletak di kota Pekanbaru. Dipilih nya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau ini sebagai lokasi penelitian Adapun ketertarikan peneliti mengambil lokasi ini adalah terkait dengan Penerapan *E-Government* di Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai reformasi tata kelola pemerintahan yang terbarukan.

Data Primer penelitian ini melalui wawancara langsung kepada badan, dinas ataupun orang-orang yang terlibat yang mengetahui tentang pengembangan *E-Government* di Pemerintahan Daerah Provinsi Riau tahun 2016 yaitu: Kasubbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau, Ketua Bidang Aplikasi Dan Informatika, Ketua Bidang Data Dan Pemberdayaan Sistem Informasi, Seksi Layanan Informasi Publik, Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintah dan Analisator *E-Government* Provinsi Riau

Data sekunder penelitian ini yaitu:

1. Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Inpres No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan
6. Peraturan Gubernur No 46 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Diskominfo Provinsi Riau
7. Lakip Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016
8. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2016
9. Daftar SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2016

PEMBAHASAN

A. Pengembangan *E-Government*

1. Tahap Persiapan

10. Program Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau
11. Data Jumlah Pengunjung *Website* Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2016
12. Data sosialisasi yang dilakukan Diskominfo Provinsi Riau Tahun 2016
13. Daftar Aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2016
14. Evaluasi Nilai Keterbukaan Informasi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2016
15. Anggaran Pengembangan *E-Government* Tahun 2016

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dengan informan dengan informan, observasi ke lapangan, serta studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen dalam penelitian tersebut.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif untuk pengolahan data yang diperoleh dilapangan. semua informasi yang dikumpulkan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.

a. Pembuatan Situs Informasi di Setiap Lembaga

Dalam penerapan *E-Government* di Provinsi Riau yang di

atur didalam Peraturan Daerah No 06 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi dan Keterbukaan, pelaksanaan *E-Government* dilakukan oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan informasi publik. Ada 43 SKPD Provinsi Riau yang telah mempunyai situs informasi publik yang terhubung oleh Diskominfo Provinsi Riau. Terkait dengan tahap persiapan *E-Government* di Provinsi Riau pada Tahun 2016 pembuatan *website* sifatnya baru satu arah saja yakni hanya memberikan informasi kepada stakeholders dan belum mencapai hubungan yang interaktif antara pemerintah sebagai pelayan dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Bentuk layanan yang di selenggarakan oleh Diskominfo Provinsi Riau hanya menampilkan informasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat sehingga masih banyak hal yang harus dipersiapkan agar masyarakat tidak hanya dapat memperoleh informasi melalui *website* saja tetapi berinteraksi bahkan melakukan transaksi secara lebih cepat. Pemerintah Daerah Provinsi Riau memiliki situs informasi yang dikelola langsung oleh Diskominfo itu sendiri, yaitu: www.riau.go.id yang berfungsi untuk memberikan informasi berupa data riau, berita, informasi OPD dan pengumuman. www.diskominfo.riau.go.id yang berfungsi untuk memberikan informasi seputar agenda kegiatan yang di lakukan oleh Diskominfo. Serta www.media.center.riau.go.id yang berfungsi untuk memberikan informasi berita-berita terkini kepada masyarakat

b. Penyiapan SDM

Dalam Pengembangan *E-Government* pada tahun 2016 Diskominfo Provinsi Riau memberikan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat secara berskala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang IT dan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas SDM, salah satunya dengan mengadakan seminar interaktif tentang pengembangan aplikasi IT. Diskominfo Provinsi Riau dalam meningkatkan kualitas SDM telah melakukan serangkaian seleksi tenaga ahli teknologi yang telah menjalani seleksi administrasi, tes Computer Assisted Test (CAT) yang meliputi tes kompetensi dasar, karakteristik pribadi, wawasan kebangsaan dan kompetisi bidang (TKB). Hal ini bertujuan untuk menyukseskan program *E-Government* pemerintahan yang berbasis elektronik. Jumlah tenaga ahli yang telah diseleksi bidang teknologi informasi akan ditempatkan masing-masing SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, ada yang tenaga ahli jaringan dan ada ahli programmer sehingga masing-masing SKPD memiliki tenaga ahli yang dapat menghandle aplikasi *E-Government* di SKPD tersebut.

c. Penyiapan Sarana Akses yang Mudah

Dalam penyiapan Sarana akses Pemerintah Daerah Provinsi Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau melakukan pengadaan infrastruktur yang dapat menunjang pengembangan *E-Government* yaitu:

1. Penyediaan bandwidth 500 mbps yang dialokasikan untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

2. Pembuatan *command center* Provinsi Riau
3. Pembelian 200 unit PC yang didistribusikan untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
4. Melakukan interoperabilitas aplikasi menggunakan MANTRA. Proses penggunaan aplikasi MANTRA yang dikembangkan oleh Kemenkominfo yang akan diintegrasikan dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
5. Pemasangan jaringan internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Riau Menggunakan Aplikasi *E-Office* merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan administrasi yang memusatkan komponen-komponen sebuah instansi yang ada di dalamnya data, informasi dan komunikasi melalui media telekomunikasi berbasis internet dan internet terhubung secara otomatis dan terintegrasi dan telah diterapkan 43 SKPD Provinsi Riau dan 8 SKPD yang belum menggunakan *E-Office* yaitu: Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Riau, Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi Riau, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Riau, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Riau, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Riau, Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Provinsi Riau, Sekretariat Korpri dan Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah. Alasan belum digunakannya *E-Office* pada 8 SKPD ini adalah karena kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan

E-Office pada SKPD tersebut, dan dari 80 tenaga ahli IT yang direkrut tidak mencukupi untuk seluruh SKPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau.

d. Sosialisasi Situs Informasi

Dalam hal ini perlunya sosialisasi tentang *E-Government* kepada instansi-instansi pemerintah dan masyarakat agar kebijakan pemerintah dalam penerapan *E-Government* dapat berjalan. Diskominfo Provinsi Riau melakukan sosialisasi tentang penerapan *E-Government* baik di internal maupun public. Diskominfo Provinsi Riau dalam mensosialisasikan penerapan *E-Government* kepada masyarakat, dengan cara membagi-bagi tugas kepada setiap bidang yang ada Diskominfo untuk membuat program kerja yang salah satunya melakukan sosialisasi kepada Instansi-instansi pemerintah lainnya dan masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing Jenis sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau di internal pada tahun 2016 yaitu :

1. Siaran langsung untuk mensinergikan strategi pusat & daerah dalam penyediaan informasi berbasis *E-Government* se-Provinsi Riau
2. Sosialisasi tentang *E-Office*
3. Seminar Identifikasi sinkronisasi, integrasi data dan informasi pembangunan daerah se-Provinsi Riau
4. Mengadakan kegiatan *workshop* jasa titipam dan jasa *provider*
5. Sosialisasi aplikasi E-DIPs (elektronik data informasi potensi spasial)

6. Sosialisasi 1 juta domain
7. Sosialisasi mekanisme perizinan lembaga penyiaran dan FGD *website*
8. Sosialisasi dan pelatihan aplikasi IOC untuk Riau *Command Center* dikalangan SKPD Riau
9. Sosialisasi dan Bimtek Layanan Aspirasi & Pengaduan Online Rakyat (Lapor)
10. Sosialisasi 1 juta Domain
11. Sosialisasi Riau *Command Center*

Dan sosialisasi yang dilakukan pada public pada tahun 2016, yaitu:

1. Diskominfo Provinsi Riau mengadakan Edukasi (Pembelajaran Insan Cakap) di sekolah maupun kepada masyarakat
2. Sosialisasi Stop Bullying di SMP dan SMA yang ada di Pekanbaru

Selain melakukan sosialisasi situs informasi Diskominfo Provinsi Riau juga melakukan pengawasan dan pemblokiran terhadap situs-situs informasi yang kurang mendidik

2. Tahap Pematangan

a. Pembuatan Situs Informasi Publik Interaktif

Situs informasi Pemerintah Provinsi Riau yang dikelola oleh Diskominfo telah mengalami perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya sejak didukung oleh Perda No 06 Tahun 2015 tentang “Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan

Keterbukaan” dan telah di selenggarakan *Soft Launcing E-Government* Provinsi Riau pada tahun 2015 sehingga mulai dilakukannya perubahan tata kelola pemerintahan dari yang manual menjadi berbasis IT sehingga situs informasi selalu dikembangkan. Didalam pengelolaan aplikasi/website ada informasi yang bersifat berskala dan ada yang bersifat setiap saat. bersifat setiap saat mengenai semua informasi aktivitas-aktivitas pimpinan, agenda rapat, agenda workshop, agenda pertemuan. yang berskala adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan seperti Renja dan Lakip yang kita tuangkan dengan format yang sudah kita saring dan sesuaikan, apakah ini dibutuhkan dan layak untuk kita tampilkan seperti APBD, APBN atau kebutuhan masyarakat secara umum seluruh informasi yang berkaitan dengan keuangan. Informasi yang berskala tersebut menurut UU Keterbukaan Informasi melakukan perubahan setiap 6 bulan selali seperti perubahan struktur organisasi, perubahan kegiatan dan kontrak-kontrak kerja

b. Pembuatan Antarmuka Keterhubungan Dengan Lembaga Lain

Koordinasi dalam organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau merupakan unsur penting dalam pengembangan E-Government. Karena dalam mewujudkan tujuan dari E-Government Provinsi Riau dibutuhkan koordinasi dari pihak-pihak terkait baik dari koordinasi Pemerintah Daerah dengan

Pemerintah Pusat, maupun koordinasi Diskominfo Provinsi Riau dengan pihak-pihak lembaga lain baik lembaga yang ada di Provinsi Riau maupun yang ada di luar Provinsi Riau. Pada tahap Pematangan Pengembangan *website* pemerintah daerah yang dilakukan Diskominfo Provinsi Riau dapat dilihat bahwa adanya perubahan didalam *website* yang dilakukan oleh Diskominfo Provinsi Riau yang pada awalnya *website* hanya sebatas memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan dinas sekarang sudah terdapat aplikasi-aplikasi yang menghubungkan antar instansi pemerintah. Aplikasi yang digunakan antar instansi Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2016 yaitu :

- *E-Office*
E-Office suatu sistem yang digunakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang berhubungan dengan administrasi yang secara maya memusatkan komponen-komponen sebuah organisasi, dimana ada data, informasi dan komunikasi dibuat melalui media telekomunikasi antar lembaga lainnya yang terhubung dalam aplikasi *E-Office*
- *E-Absen*
E-Absen suatu sistem yang digunakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan kedisiplinan para pegawai dan honorer dengan menggunakan sidik jari ketika apel pagi.
- *Simpeg*
Simpeg merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau membantu dalam mengorganisir dan pemusatan

data kepegawaian dalam proses pengelompokkan dan pencarian sehingga mempermudah dalam melakukan fungsi analisis dan pengawasan kepegawaian.

3. Tahap Pematapan

a. Pembuatan Situs Transaksi

Pengembangan *E-Government* di Provinsi Riau tidak adanya situs transaksi pelayanan publik. Pemerintah daerah melalui Diskominfo masih berupaya untuk melakukan pemanfaatan teknologi informasi mencakup aktivitas pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik

b. Pembuatan Aplikasi Maupun Data Dengan Lembaga Lain

Pada akhir tahun 2016 Diskominfo Provinsi Riau telah mengembangkan 28 aplikasi online yaitu:

Tabel 1 Daftar Aplikasi Online Yang di Kembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau tahun 2016

Nama Aplikasi	Fungsi	Link
Media Center	Website Media Center Provinsi Riau	http://mediacent er.riau.go.id/
Streaming Riau	Streaming TV Kegiatan Pemerintah Provinsi Riau	http://streaming. riau.go.id/

SDDKD	Sistem Pembangunan Daerah Provinsi Riau	http://sddkd.riau.go.id/
Drive Riau	Penyimpanan Online	http://drive.riau.go.id/
e-Mail	Aplikasi e-Mail Pemerintah Provinsi Riau	http://mail.riau.go.id/
e-Office	Aplikasi Surat Menyurat SPj dan SPT	http://e-office.riau.go.id/
SIMPEG	Sistem Informasi Pegawai	http://simpeg.riau.go.id/
e-absen	Aplikasi Absen Digital	http://e-absen.riau.go.id/
Peta Riau	Informasi data dalam Peta (Peta Riau)	http://peta.riau.go.id/
Website KIM	Kelompok Informasi Masyarakat	http://kim.riau.go.id/
e-Aplikasi	Pendataan Aplikasi Pemerintah Provinsi Riau	http://aplikasi.riau.go.id/
PPID Online	Pengajuan Permohonan Informasi Online	http://diskominfo.riau.go.id/form-pendaftaran.html
Jaga APBD	Informasi APBD Provinsi Riau	http://jagaapbd.riau.go.id/
Agenda Gubernur	Informasi Kegiatan Gubernur	http://agenda.riau.go.id/
Website Haki		https://integritas.riau.go.id
Info OPD	Informasi Kegiatan OPD	https://www.riau.go.id/home/skpd
Subdomain	Kumpulan Website dan Email	http://subdomain.riau.go.id/

Lapor	Layanan Inspirasi dan pengaduan Online Rakyat	https://www.lapor.go.id/
-------	---	---

Sumber: Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Riau

4. Tahap Pemanfaatan

a. Pembuatan aplikasi bersifat:

- *Government to Government*

Tabel 2 Daftar Aplikasi G2G Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016

No	Nama Aplikasi	Fungsi
1	<i>Drive Riau</i>	Penyimpanan Online
2	<i>E-Email</i>	Aplikasi E-Email Pemerintah Provinsi Riau
3	<i>E-Office</i>	Aplikasi surat menyurat SPJ dan SPT
4	<i>Simpeg</i>	Sistem Informasi Pegawai
5	<i>E-Absen</i>	Aplikasi absen digital

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau

- *Government to Business*
Government to business yaitu relasi antara pemerintah dengan pelaku baik didalam negeri maupun di luar negeri. Terdiri dari transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang

dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik

- *Government to citizen*
Government dengan Citizen yaitu suatu hubungan antara pemerintah dengan rakyat sehingga adanya akses informasi yang dapat dimanfaatkan/diperoleh masyarakat untuk kepentingannya. Pemerintah Provinsi Riau memiliki aplikasi yang dapat dimanfaatkan diakses oleh masyarakat yaitu:

- 1) Sddkd (sistem database dukungan kebijakan daerah)
- 2) Lapor (layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat)
- 3) Data penerimaan realtime PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ Provinsi Riau
- 4) KIM (Kelompok informasi Masyarakat)
- 5) Layanan Perizinan
- 6) GSB (Government Servis Bus)
- 7) LPSE (Layanan pengadaan secara elektronik)
- 8) Laporan kerusakan jalan
- 9) Info pajak kendaraan

B. Faktor Penghambat Pengembangan E-Government

1. Internal

- a. Kurang maksimalnya keamanan jaringan (Network Security)
- b. Kurang maksimalnya ketersediaan data umum, data pembangunan dan data spasial
- c. Keterbatasan anggaran

2. Eksternal

- a. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat akan teknologi informasi
- b. Kurangnya komitmen setiap SKPD Provinsi Riau dan SKPD ka/kota terhadap integrasi data, pertukaran data dan keterisian data
- c. Tingginya sengketa informasi yang terjadi

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *E-Government* yang dilakukan di Pemerintah Daerah Provinsi Riau sesuai dengan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 dalam pengembangan *E-Government* telah sampai pada tahap pemantapan. Hal ini ditandai dengan terhubungnya setiap SKPD didalam satu server yaitu riau.go.id yang dikelola langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dan di dukung oleh komitmen Gubernur Provinsi Riau dengan diselenggarakannya *soft launching E-Government* pada tahun 2015 sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam implementasikan *E-Government* di Provinsi Riau
2. Faktor penghambat dalam pengembangan *E-Government* di Pemerintahan Daerah

Provinsi Riau diinternal yaitu kurang maksimalnya keamanan jaringan (*Network Security*), Kurang optimalnya layanan informasi publik (personal, sarana dan konten) yang ada didalam *website* karena ketersediaan data umum dan data spasial didalam belum maksimal, keterbatasan anggaran, sedangkan di eksternal yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat akan teknologi informasi, kurangnya komitmen setiap SKPD Provinsi Riau dan SKPD Kab/Kota terhadap integritasi data, pertukaran data dan keterisian data dan tingginya sengketa informasi publik yang terjadi karena masih banyak badan publik yang tidak transparansi.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebaiknya lebih berhati-hati dalam membangun sistem *E-Government* terutama dalam segi keamanan untuk mencegah semua tindak kejahatan terhadap pengembangan *E-Government*. Dalam pelaksanaan *E-Government* pemerintah lebih serius dan cepat dalam memperbarui data yang akurat karena pada dasarnya *E-Government* bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah juga harus siap dalam menghadapi permintaan informasi dengan prosedur yang mudah dan cepat tanpa harus

datang ke Dinas terkait untuk memperoleh informasi.

2. Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebaiknya menambah media sosialisasi yang digunakan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengembangan yang telah dilakukan sehingga masyarakat atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan pemerintah lebih paham dan cermat terhadap perubahan yang telah dilakukan dipemerintah sehingga tingkat partisipasi masyarakat tinggi terhadap pemerintah

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Akadun. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*, Bandung: alfabeta.
- Andrianto, nico. 2007. *Good E-Government: Transparansi dan akuntabilitas public melalui E-Government*. Malang: Bayu Media.
- Dwiyanto Agus, dkk. 2002. *Reformasi Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- _____. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Gadjah Mada: University Press.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas pelayanan publik konsep, dimensi, indikator dan implementasinya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Herdiyansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian*

- Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Holidin Defny,dkk. 2016. *Reformasi Birokrasi Dalam Transisi* . Jakarta: Prenadamedia.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Elektronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta:Andi.
- _____. 2005. *E-Government In Action*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2006 . *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi.
- Rianto, Budi,dan Tri lestari. 2012. *Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik*. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara (PMN).
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Suardi, falih dan Bintaro Wardiyanto. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan E-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suprpto.2003.*Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Wahyudi,Ambar. 2010 . *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*. Yogyakarta: Gava Media.
- Widjaja, Haw. 2004. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Artikel dan Jurnal**
- Gabriel Vian,dkk. 2017. *Politik Hukum Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Wonogiri*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 2 juli-Desember.
- Hidayat Anto. 2011. *Implementasi E-Government Dalam Administrasi Pemerintahan di Kbupaten Banyumas*,laporan penelitian, Universitas Terbuka.
- Mustakim. 2017. *Analisis Website E-Government Provinsi Riau Sebagai Pendukung Model Multi Attribute Decision Making* ,Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi. Vol. 3, No. 1, Februari. Hal. 35-44 e-ISSN 2502-8995 p-ISSN 2460-8181.
- Oktavya, Ayu Aditya. 2015. *Penerapan (Electronic Government) e-government pada kantor pelayanan pajak pratama dalam pemberian pelayanan di kota bontang* . Ejournal Ilmu Pemerintahan.
- Radjaguguk,MA. "Reformasi sistem tata kelola dalam pelayanan

publik pada pemerintahan yang baik (*good governance*)". Jurnal Program Pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Januari 2015.

Richardus Eko Indrajit.
Elektronik Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital).

Sosiawan, Edwi Arief.
"Tantangan Hambatan Dalam Implementasi E-Government di Indonesia" . Seminar Nasional Informatika 2008, UPN "Veteran" Yogyakarta, 28 Mei 2008. ISSN: 1979-2328.

Suryani Puri,Muslim Ansori.
Pengukuran Indeks Kualitas Pengelolaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Vergien, Gianio. 2016 .
Pelaksanaan E-Government Di Kantor Imigrasi Kelas Ia Kota Pekanbaru Tahun 2014 .
JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tetang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang *Keterbukaan Informasi Publik*

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang *Kebijakan Dan Strategi Nasional*

Pengembangan E-Government.

Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 Tahun 2015 Tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan*

Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2014 Tentang *Ricinan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau*

Dokumen

Kementerian informasi dan komunikasi. 2003 .“*panduan penyusunan rencana induk pengembangan e-government lembaga.*

Laporan kinerja (Lakip) Dinas Komunikasi dan Informatika Proviinsi Riau Tahun 2015

Laporan kinerja (Lakip) Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Riau Tahun 2016